

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR, DAN DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

**Ida Ayu Surya Krisna Jayanti¹
I Ketut Sutrisna²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (UNUD), Bali, Indonesia

¹email: iasuryakrisna@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, 1) menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, infrastruktur dan dana desa berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2) Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, infrastruktur dan dana desa berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan data panel *time series* dari tahun 2017-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan di BPS Provinsi Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Tingkat pendidikan, Belanja Modal dan Dana Desa berpengaruh simultan dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. 2) Tingkat pendidikan, Infrastruktur dan Dana Desa berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Kata kunci: tingkat pendidikan, infrastruktur, dana desa, tingkat kemiskinan

ABSTRACT

The objectives of this study are as follows, 1) to analyze the effect of the level of education, infrastructure and village funds simultaneously on poverty in districts / cities in Bali Province, 2) To analyze the effect of education level, infrastructure and village funds partially influence poverty in the district or City in Bali Province. The research method used in this research is multiple linear regression with time series panel data from 2017-2019. The data used in this study is secondary data obtained at BPS Bali Province. The results of this study indicate that, 1) The level of education, capital expenditures and village funds have a simultaneous and significant effect on the Poverty Level in the Regency / City of Bali Province. 2) The level of education, infrastructure and village funds has a partially significant negative effect on the Poverty Level in the Regency / City of Bali Province.

Keywords: education level, infrastructure, village funds, poverty level

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang menjadi pusat perhatian utama di Indonesia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional, kemiskinan tidak hanya terjadi di kota saja namun juga sebagian besar terjadi di pedesaan. Kemiskinan dapat dicirikan dengan keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang berhubungan dengan kualitas hidup. Kemiskinan juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga Negara (Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN). Pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian di suatu negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Arief dan Andy, 2015). Pertumbuhan ekonomi yang cepat oleh negara-negara di dunia menjadi salah satu syarat utama untuk mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi sendiri tidak akan cukup untuk mengurangi angka kemiskinan, namun pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang dibutuhkan (Sri Budhi, 2013). Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan kelompok orang. Kemiskinan yang melanda perekonomian Indonesia, hingga saat ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Indonesia masih belum mampu keluar dari perangkap pertumbuhan ekonomi yang rendah, meskipun pertumbuhan ekonomi merupakan syarat terciptanya lapangan pekerjaan dan pengurangan angka kemiskinan. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran dari pemerintah yaitu kegagalan mengatasi

persoalan kemiskinan yang dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat (Yudistira, 2018). Program-program Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan telah menekan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya. Namun demikian, berbagai program tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi target pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan (Inna, 2014). Program-program Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan telah banyak dilakukan, seperti: Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program-program bergulir lainnya. Namun, sebagian besar program tersebut bersifat top-down. Disamping itu, ada beberapa program yang tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena penentuan sasaran secara langsung tanpa melalui proses perencanaan dan tidak melihat kondisi langsung di masyarakat. Beberapa program memiliki prosedur yang sangat rumit sehingga tidak tepat waktu, tidak efektif dan tidak efisien.

Pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh negatif terhadap kemiskinan, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat akan dapat mengurangi angka kemiskinan. Penelitian sejenis yang mengungkapkan hal senada disampaikan oleh Permadi (2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu (Ashcroft, *et al.*, 2008).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), melaporkan angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,41% dari jumlah penduduk per Maret 2019 atau mencapai

25,14 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan Maret 2018 yang berada di angka 9,82% atau 25,95 juta jiwa, angka kemiskinan turun sebesar 41 basis poin (bps) atau sebanyak 810 ribu jiwa. Dari 34 provinsi, terdapat 16 provinsi yang memiliki angka kemiskinan di atas angka nasional. Lima provinsi yang memiliki angka kemiskinan terbesar berada di kawasan timur Indonesia. Provinsi tersebut adalah Papua (27,53%), Papua Barat (22,17%), Nusa Tenggara Timur (21,09%), Maluku (17,69%), dan Gorontalo (15,52%).

Provinsi Bali memiliki delapan kabupaten dan satu kota dengan potensi daerah yang berbeda di setiap wilayahnya dan telah mengalami ketimpangan distribusi pendapatan (Gama, 2009). Setiap daerah memiliki berbagai potensi yang berbeda, potensi yang dimiliki yaitu potensi alam, infrastruktur, sumber daya manusia dan investasi, sehingga hal ini dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan (Bendesa dkk, 2011). Apabila ketimpangan daerah dibiarkan maka akan memperlebar jurang pembangunan antara daerah kaya dan daerah miskin, sehingga dapat menyebabkan terjadinya migrasi dari daerah miskin ke daerah kaya. Kesenjangan pendapatan merupakan ketimpangan relatif pendapatan antar golongan masyarakat yang diukur dengan Gini Ratio yang diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (ketidakmerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dan dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana kurva Lorenz itu berada. Gini Ratio digunakan sebagai ukuran pemerataan pendapatan yang mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati 0 maka menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati 1 maka menunjukkan ketimpangan yang tinggi

(Dewangga, 2011). Dari segi penyebabnya, Todaro dalam Suyana Utama (2008) mengatakan, kesenjangan distribusi pendapatan di negara yang sedang berkembang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang, dan investasi.

Kemiskinan merupakan suatu konsep integrasi yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, namun kemiskinan juga terkait dengan aspek lainnya seperti akses infrastruktur dan peluang pekerjaan. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, sangat rentan terhadap ancaman tindakan kriminal, serta tidak berdayanya dalam menghadapi suatu kekuasaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri Chambers (1998).

Menurut Suparlan (1994), menyatakan bahwa kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan kekurangan harta atau benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang. Akibat dari kekurangan harta atau benda tersebut maka orang itu akan merasa kurang mampu membiayai kebutuhan hidupnya sebagaimana layaknya. Kurang mampu tersebut mungkin hanya pada tingkat kebutuhan-kebutuhan seperti

tingkat kebutuhan budaya (adat, upacara-upacara, moral, dan etika), tingkat pemenuhan kebutuhan sosial (pendidikan, berkomunikasi dan berinteraksi) dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang mendasar (makan, minum, berpakaian, tempat tinggal atau rumah, kesehatan dan sebagainya).

Provinsi Bali dikenal sebagai destinasi pariwisata yang maju dan terkenal diseluruh dunia. Dibalik majunya industri pariwisata, namun Provinsi Bali tak luput dari masalah kemiskinan. Pemerintah Provinsi Bali secara bertahap telah berupaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui strategi yang dilakukan dengan pelaksanaan program pro-rakyat serta memberikan sarana yang memadai untuk mampu mengakses dan memenuhi berbagai pelayanan kebutuhan masyarakat seperti program bedah rumah (renovasi rumah), kartu Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), bedah rumah, program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) (Astrini, 2013). Berikut terdapat beberapa penduduk miskin di Provinsi Bali yang ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Jembrana	15.83	14.53	14.78	14.35	13.55
Kab. Tabanan	24.05	21.9	21.66	19.77	18.74
Kab. Badung	14.4	12.91	13.16	12.97	11.89
Kab. Gianyar	22.89	22.13	22.42	21.26	19.85
Kab. Klungkung	12.11	11.21	11.15	10.43	9.66
Kab. Bangli	12.74	11.66	11.76	11.05	10,08
Kab. Karangasem	30.33	27.12	27.02	26.02	25.99
Kab. Buleleng	43.43	37.55	37.48	35.2	34.26
Kota Denpasar	20.94	19.17	20.7	20.72	19.83
Provinsi Bali	196.71	178.18	180.13	171.76	163.85

Sumber: BPS, 2019

Berdasarkan Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa penduduk miskin terbanyak di Provinsi Bali terdapat di Kabupaten Buleleng dan Karangasem. Hal ini disebabkan karena minimnya objek wisata dan wilayah yang tidak subur serta masih kurangnya infrastruktur di Kabupaten Buleleng dan Karangasem sehingga dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Sedangkan penduduk miskin terendah terdapat di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Badung. Rendahnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung dan Kabupaten Klungkung disebabkan karena kabupaten tersebut menunjukkan kemajuan sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah. Terciptanya lapangan pekerjaan dan adanya bantuan dari pemerintah juga dapat membantu mengurangi kemiskinan di Kabupaten Badung dan Kabupaten Klungkung.

Menurut Damuri dan Day (2015), teori-teori kemiskinan memiliki paradigma besar yang berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan penanggulangan

kemiskinan. Dua paradigma yang dimaksud yaitu Neo-Liberal dan Demokrasi-sosial. Dua paradigma ini memiliki perbedaan yang jelas terutama dalam melihat kemiskinan maupun dalam memberikan solusi penyelesaian masalah kemiskinan. Suryawati (2005) menyatakan kemiskinan dapat dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu: 1) kemiskinan absolut: suatu kondisi yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak cukup untuk memenuhi sandang, pangan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja; 2) kemiskinan relatif: kondisi miskin dikarenakan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum terjangkau untuk seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan; 3) kemiskinan kultural: mengacu pada sikap persoalan seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemborosan, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar; 4) kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Menurut Sharp (1996) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan apabila dipandang dari sisi ekonomi yaitu: 1) secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah, 2) kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti

produktivitasnya rendah, rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya tingkat pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan, 3) kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal. Tingkat pendidikan menjadi faktor utama dalam bertambahnya angka kemiskinan, minimnya fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil menyebabkan Sumber Daya Manusia yang ada juga masih sangat rendah tingkat pengetahuan dan keterampilannya sehingga belum mampu mencari kehidupan yang layak. Tingkat pendidikan sangat berperan dalam meningkatkan modal manusia di suatu negara dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, pendidikan yang tinggi dapat menghantarkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak (Maulana, 2020).

Pendidikan (formal) merupakan cara tepat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Makin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi kualitas tenaga kerja. Apabila semua tenaga kerja berkualitas yang terlibat aktif dalam perekonomian, maka akan meningkatkan output barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, akan menciptakan investasi, membuka lapangan kerja, menyerap angkatan kerja, yang pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan penduduk (Seran, 2017).

Pendidikan merupakan jendela ilmu pengetahuan, pendidikan adalah sebuah upaya yang memerlukan proses panjang agar seorang individu mampu berpikir dan bertanggung jawab. Hal ini membuat posisi pendidikan dalam lingkaran kemiskinan menjadi penting. Pendidikan akan membuat seseorang memiliki kecakapan hidup untuk berpikir kreatif dan inovatif sehingga akan membuka banyak opsi bagi

masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, pendidikan saat ini masih digunakan sebagai salah satu kualifikasi dalam memperoleh pekerjaan, tentunya ini adalah kaitan nyata antara Pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan (Anggraeni, 2017). Berikut terdapat presentase jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditunjukkan dalam tabel 1.2.

Tabel 2.
Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di
Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2019

Kabupaten /Kota	2019 Ijasah Tertinggi yang Dimiliki (Persen)					Tidak mempunyai ijasah
	SD	SMP	SMA	DI/DII/D III	DIV/S1/ S2/S3	
Jembrana	27.11	20.83	28.79	2.20	5.40	15.57
Tabanan	25.72	18.73	30.47	4.58	7.46	13.04
Badung	14.73	19.44	40.97	6.65	10.52	7.69
Gianyar	16.60	17.25	26.08	5.03	11.28	23.76
Klungkung	18.23	14.09	32	4.13	8.38	23.17
Bangli	29.42	18.17	21.97	1.89	4.61	23.94
Karangasem	24.68	20.32	16	1.51	5.28	32.22
Buleleng	25.88	18.50	19.97	1.75	5.43	28.47
Denpasar	12.84	20.36	41.52	5.14	14.65	5.49
Provinsi Bali	20.02	19.05	30.55	4.05	9.21	17.11

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang memiliki ijasah lebih kecil dari ijasah SMA tahun 2019 sebanyak 19,05 persen ijasah tingkat SMP, 20,02 persen ijasah tingkat SD, dan 17,11 persen penduduk yang tidak mempunyai ijasah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Provinsi Bali yang tidak mengenyam pendidikan sampai tahap SMA. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu faktor penyebab penduduk miskin.

Infrastruktur merupakan hal penting bagi pertumbuhan ekonomi dalam berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur tidak hanya

merupakan kegiatan produksi yang akan menciptakan output dan kesempatan kerja, namun keberadaan infrastruktur juga mempengaruhi efisiensi dan kelancaran kegiatan ekonomi di sektor-sektor lainnya. J'afar (2007) menyatakan bahwa infrastruktur memiliki peran positif dalam pertumbuhan ekonomi dan merupakan kebutuhan negara-negara yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sarana atau alat untuk menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta memberi isi dan arti tanggung jawab pemerintah daerah karena APBD menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Belanja daerah adalah seluruh pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak tersangka.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) belanja modal merupakan salah satu unsur belanja langsung. Belanja modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Belanja modal memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, salah satu dari sebelas prioritas pembangunan nasional tersebut

adalah infrastruktur. Dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 menyatakan, infrastruktur diprioritaskan dalam anggaran belanja modal setelah dikurangi belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung dan belanja wajib lainnya.

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan (UU 32/2004). Kewajiban daerah tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli.

Pengeluaran atau belanja pemerintah adalah salah satu unsur dari kebijaksanaan fiskal dengan tujuan dapat meningkatkan laju investasi, peluang kerja dengan memelihara kestabilan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan. Dalam teori makro pertumbuhan pengeluaran atau belanja pemerintah di klaim oleh para ahli yang di golongan dalam pembangunan tentang peningkatan pengeluaran atau belanja.

Pengeluaran atau belanja pemerintah adalah suatu komponen penting dengan tujuan agar mengurangi kemiskinan. Pengeluaran pemerintah merupakan kegiatan pemerintah agar menciptakan perekonomian setiap penentuan maksimalnya belanja pemerintah dalam periode dari biasanya yang di sebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke daerah atau regional. Pada umumnya belanja pemerintah meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi suatu wilayah, namun peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah belum tentu memberikan dampak positif terhadap aktivitas perekonomian.

Banyak strategi yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, namun strategi itu belum mampu menekan angka kemiskinan (Dariwardani, 2014). Peran pemerintah daerah maupun pusat memang sangat diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sejak tahun 2015, pemerintah memberikan Dana Desa kepada desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya. Pemerintahan Desa yang merupakan sistem pemerintahan yang terbawah di dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mengalami reformasi dalam era otonomi daerah ini. Dalam UU No.22 Tahun 1999 ditegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif. Kedudukan pemerintahan desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya

sendiri. Berbeda dengan UU No.5 Tahun 1979 yang sama sekali tidak memberikan hak kepada pemerintahan desa atau kepala desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.

Kedudukan pemerintahan Desa diperkuat lagi dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI No.72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Desa (atau dengan sebutan lain) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa tersebut adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Landasan pemikiran tersebut merupakan wujud pemberian dukungan dan dorongan kepada desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dan juga mencerminkan Pemerintah Desa sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dan terdekat dengan masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat strategis serta sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dan cepat.

Dengan kedudukannya tersebut, saatnya pemerintah Desa berupaya melakukan pembenahan menuju arah kemandirian desa. Pasal 215 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 pun secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga, harus mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi desa telah

didudukkan sebagai komponen pelaksana pembangunan yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa pun menjadi wewenang desa yang mesti terjabarkan dalam peraturan desa (Perdes) tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Selanjutnya bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah Kabupatenlah yang berkewajiban untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Pendapatan itu bisa bersumber lagi dari bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Selanjutnya regulasi juga membolehkan desa untuk mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Artinya desa sesungguhnya telah didorong, diupayakan dan diharapkan menjadi mandiri dan berdikari. Apalagi bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harusnya menjadikan desa benar-benar sejahtera. Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam

melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan.

Ada tiga strategi utama yang harus dilakukan dalam menanggulangi masalah kemiskinan yaitu bantuan sosial seperti memberikan akses bagi rumah tangga miskin untuk mendapatkan pelayanan baik itu pendidikan, kesehatan, air bersih dan kebutuhan gizi, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin agar mampu meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik lagi dan yang terakhir adalah memberikan bantuan berupa kredit bagi usaha ekonomi mikro dan kecil (Putra dan Sri Budhi, 2015). Banyaknya strategi yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan namun strategi itu belum mampu menekan angka kemiskinan. Peran pemerintah daerah maupun pusat memang sangat diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Salah satu tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai pengentasan kemiskinan dan kesenjangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penggunaannya, 30 persen ADD digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan 70 persen digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat (Nurcholis, 2011:90). Sebagai bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pemerintah desa perlu mendapat supervisi dari level pemerintah di atasnya. Hal ini dikarenakan untuk kedepannya, jumlah Dana Desa yang akan diberikan ke desa akan semakin besar sementara kapasitas dan kapabilitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan keuangan desa masih belum cukup

memadai. Selain itu, keterlibatan masyarakat untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan dana desa masih dirasakan minimal. Dengan demikian, ini menjadi tugas dan catatan penting tidak hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga bagi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa serta masyarakat untuk membangun desa secara kolektif (Azis, 2012).

Berkenaan dengan dikucurkannya dana desa dan alokasi dana desa diharapkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersama ketimpangan pembangunan antar wilayah akan pula dapat dikurangi. Alokasi dana yang merata dan tepat sasaran serta pengelolaan sumber-sumber pendapatan secara optimal, efisien dan efektifitas dalam penggunaan anggaran belanja merupakan hal pokok yang harus selalu diprioritaskan. Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Disamping itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat (Pitri, 2018). Adapun permasalahan yang akan diangkat ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, infrastruktur, dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Maka berdasarkan data dan uraian tersebut penyusun tertarik ingin mengembangkan dan meneliti pengaruh tingkat pendidikan, infrastruktur, dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Luas Provinsi Bali sekitar 5.636.66 Km² yang terbagi ke dalam 9 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar. Dipilihnya lokasi ini, karena di kabupaten/kota Provinsi Bali masih memiliki tingkat kemiskinan yang belum merata seperti kabupaten Karangasem dan Buleleng yang masih dibawah rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Bali. Provinsi Bali pula merupakan salah satu provinsi yang memiliki perkembangan ekonomi yang cukup pesat dari sektor pariwisata. Namun ditengah pesatnya perkembangan ekonomi tersebut masih ditemukannya jumlah penduduk miskin.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari pihak lain yang telah mengumpulkan data sebelumnya. Data tingkat pendidikan dan dana desa diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada tahun 2017-2019, sedangkan data infrastruktur diperoleh dari Bank Indonesia dalam Buku Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Bali.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda, teknik ini digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel yang digunakan yang dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:
Y = Kemiskinan

X1	= Tingkat Pendidikan
X2	= Infrastruktur
X3	= Dana Desa
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= koefisien dan regresi dari masing-masing X_i
α	= intersep/konstanta yang menggambarkan rata-rata pengaruh dari berbagai variabel/factor yang mempengaruhi Y akan tetapi tidak dimasukkan ke dalam persamaan regresi.
e	= tingkat kesalahan (<i>standar error</i>)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam residual dari model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* > *level of significant* ($\alpha=0,05$). Hasil uji normalitas seperti pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar $0,105 > 0,05$ memiliki arti bahwa data sampel yang diuji berdistribusi normal sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Tabel 3.
Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		30
	Mean	.0000000
	Std. deviation	9,74164095
Most Extreme Differences	Absolute	0,97
	Positive	0,97
	negative	-0,89
Test Statistic		
Asymp. Sig. (2-tailed)		,531
		,941

Sumber: Data diolah, 2020

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat kolerasi di antara variabel bebas. Hasil uji Multikolinieritas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.
Hasil Uji Multikolinieritas

No.	Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
1	Tingkat Pendidikan	0.778	1.285	Tidak terdapat multikolinieritas
2	Belanja Modal	0.110	9.053	Tidak terdapat multikolinieritas
3	Dana Desa	0.120	8.328	Tidak terdapat multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa semua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil uji tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas dalam model.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas atau mempunyai varian yang homogen. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan

metode glejser. Jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka model regresi dikatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

No.	Variabel	Sig.	Kesimpulan
1	Tingkat Pendidikan	0.117	Tidak terdapat heteroskedastisitas
2	Belanja Modal	0.452	Tidak terdapat heteroskedastisitas
3	Dana Desa	0.093	Tidak terdapat heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa tingkat signifikansi dari masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,05, maka model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Teknik analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat pendidikan, infrastruktur, dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali yang terdiri dari uji F (secara simultan) dan uji T (secara parsial). Hasil olah data menggunakan *IBM SPSS Statistic 20* seperti pada lampiran 1 menghasilkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 Y &= 66,508 - 0,825 X_1 - 0,006 X_2 - 2,456 X_3 \\
 S(\beta) &= (-0,090) \quad (-0,174) \quad (-0,830) \\
 T &= (-1,931) \quad (-1,405) \quad (-7,009) \\
 \text{Sig}(t) &= (0,004) \quad (0,002) \quad (0,000) \\
 R^2 &= 0,956 \quad F = 189,135 \quad \text{Sig } F = 0,000
 \end{aligned}$$

Interpretasi :

$R^2 = 0,956$ memiliki arti bahwa ketiga variabel tingkat pendidikan (X_1), infrastruktur (X_2), dana desa (X_3) mampu menjelaskan 95,6 persen perubahan

dalam tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dan sisanya 4,4 persen di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

β_1 = 0,090 bernilai negatif signifikan, memiliki arti bahwa setiap peningkatan tahun sukses pendidikan sebesar 1 tahun dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,090 point. Dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.

β_2 = 0,174 bernilai negatif signifikan, memiliki arti bahwa dengan meningkatnya belanja modal sebesar 1 juta rupiah akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0,174 persen dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.

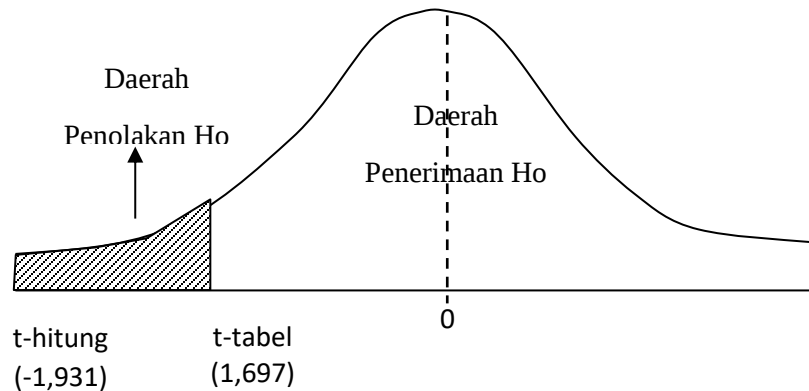
β_3 = 0,830 bernilai negatif signifikan, memiliki arti bahwa dengan meningkatnya dana desa sebesar 1 juta rupiah akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0,830 persen dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 189,135 dengan nilai signifikan 0,000, maka terjadi penolakan H_0 . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, infrastruktur dan dana desa berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Nilai F_{hitung} variabel tingkat pendidikan, infrastruktur, dan dana desa secara simultan lebih besar dari F_{tabel} yaitu sebesar 4,27 (Lampiran 2) dan nilai signifikan yang diperoleh lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian didapatkan besarnya koefisien determinan $R^2 = 0,956$ yang berarti bahwa variabel tingkat pendidikan, infrastruktur, dan dana desa mampu menjelaskan 95,60 persen perubahan dalam tingkat kemiskinan di Kabupaten Kota/Provinsi Bali dan sisanya 4,40 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai probabilitas sebesar $-0,04 < 0,05$, hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengaruh meningkatnya tingkat pendidikan akan mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat disuatu daerah sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut. Dengan menurunnya angka pengangguran maka dapat dipastikan produktivitas masyarakat meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup/keluarganya sendiri. Azizah dkk (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Menurut Aristina dan Sri Budhi (2017) tingkat pendidikan berpengaruh simultan dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan secara parsial dan simultan (Wibowo, 2014).

Menggunakan derajat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5% ($\alpha 0,05$, dan derajat kebebasan: $n-k-1$, test satu sisi pada sisi kanan diperoleh nilai t -tabel ($0,05; n-k-1 = (30-3)$, maka t tabel = 1,697.

Nilai t hitung $> t$ tabel ($-1,931 > 1,697$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada kurva normal di bawah ini:



Gambar 1. Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho

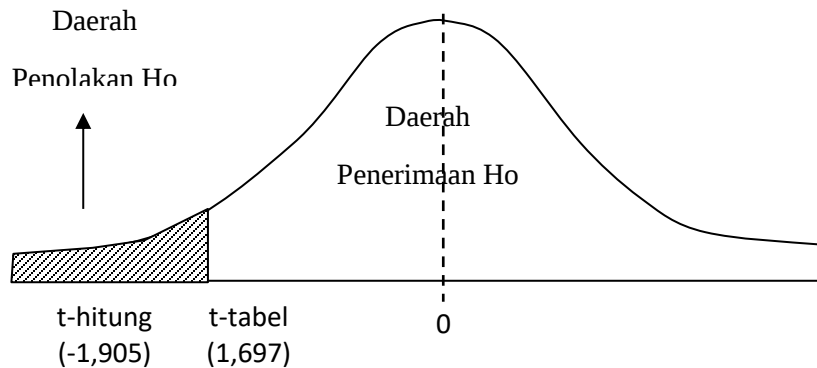
Sumber: Data diolah, 2020

Nilai standardized coefficient beta sebesar -0,090 dan nilai probabilitas sebesar $0,004 < 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel ($-1,931 > 1,697$). Hal tersebut berarti bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,02 < 0,05$, hal ini berarti bahwa infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengaruh meningkatnya pengeluaran biaya modal untuk infrastruktur akan mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya pengeluaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur bagi masyarakat akan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonominya. Menurut Meliana Sari (2017), menyatakan bahwa infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dengan adanya infrastruktur yang lengkap akan memudahkan akses masyarakat pada kegiatan ekonomi seperti bekerja, melakukan transaksi dan kegiatan lainnya.

Nilai t hitung $> t$ tabel ($-1,905 > 1,697$) maka H_0 ditolak dan H_6 diterima. Untuk

lebih jelasnya, dapat dilihat pada kurva normal di bawah ini:



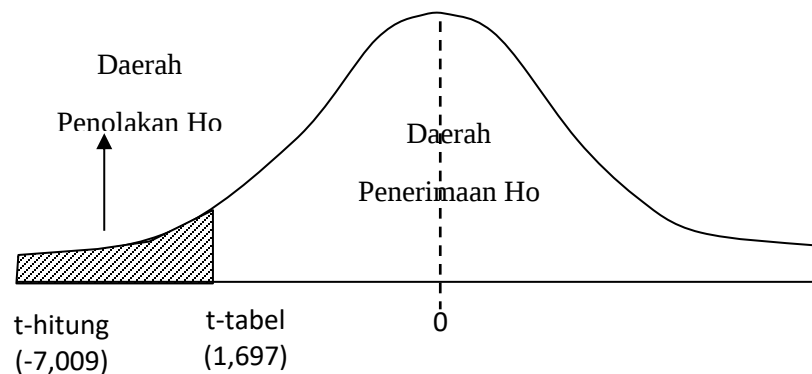
Gambar 2. Daerah Penolakan dan Penerimaan H_0

Nilai standardized coefficient beta sebesar $-0,174$ dan nilai probabilitas sebesar $0,002 < 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel ($-1,905 > 1,697$). Hal tersebut berarti bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak, artinya Infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai probabilitas sebesar $-0,00 < 0,05$, hal ini berarti bahwa dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan serta pertumbuhan wilayah-wilayah strategis harus ditingkatkan, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Peningkatan kualitas dan perluasan ruang lingkup dari pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi sumber daya manusia yang berkualitas dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan miskin

Adapun penelitian menurut Susilowati dkk., (2017) menyatakan bahwa dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dana desa diberikan untuk memperbaiki infrastruktur desa seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan, dan sarana – sarana yang dibutuhkan (Marhaeni dkk.,8:2019).

Nilai t hitung $>$ t tabel ($-7,009 > 1,697$) maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada kurva normal di bawah ini:



Gambar 3. Daerah Penolakan dan Penerimaan H_0

Sumber: Data diolah, 2020

Nilai standardized coefficient beta sebesar $-0,830$ dan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $>$ t tabel ($-7,009 > 1,697$). Hal tersebut berarti bahwa H_3 diterima dan H_0 ditolak, artinya Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

SIMPULAN

Tingkat Pendidikan, infrastruktur, dan dana desa berpengaruh simultan dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Ketiga variabel dapat menjelaskan 95,6 persen perubahan dalam tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Bali, dan sisanya sebesar 4,4 persen merupakan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti.

Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif secara parsial terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Infrastruktur berpengaruh negatif secara parsial terhadap kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Bali. Dana desa berpengaruh negatif secara parsial terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan pendidikan dan keterampilan masyarakat dengan memperbanyak sekolah-sekolah kejuruan yang mampu menambah pendapatan sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan masyarakat diharapkan tetap meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengikuti program wajib belajar 9 tahun.

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur melalui perbaikan sarana prasarana, pembangunan, dan sarana yang dibutuhkan agar masyarakat dapat lebih mudah melakukan aktivitas ekonomi.

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan dana desa sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan desa itu sendiri, selain itu tujuan diberikannya dana desa

yaitu agar dapat meningkatkan potensi desa baik fisik maupun non fisik yang akan menjamin suksesnya pembangunan di desa dengan pemanfaatan dana desa.

REFERENSI

- Arief Anshory Yusuf, Andy Sumner. 2015. Growth, Poverty, and Inequality Under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51 (3), : 323-348.
- Ashcroft, Vincent dan David Cavanough. 2008. Survey of Recent Developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(3), : 335-363.
- Azis, Rikp. 2012. *Tinjauan Yuridis Efektifitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011*.
- Azizah, Elda Wahyu. 2018. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol 2 Jilid 1.
- Aristina Ita dan Made Kembar Sri Budhi. 2017. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali*. E-Jurnal EP Unud, 6[5]: 677-704.
- Anggraeni. 2017. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 6 Nomor 5. 499-509.
- Astrini, A. Ni Made Myanti dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2013. Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. e- jurnal Ekonomi Pembangunan. Universitas Udayana. Vol. 2, No. 8.”
- Ardila, Herminawaty, & Raifudin. 2017. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Buton Utara. *Jurnal riset*. Volume 3 Nomor 003. 89-102.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Presentase Penduduk Miskin Maret 2019.
- Badan Pusat Statistik (2020). Jumlah Penduduk Miskin Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2019.

Badan Pusat Statistik (2018). Presentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijasah Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2019.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Bali Dalam Angka 2013 <http://www.bps.go.id>

Bank Indonesia (2019). Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Bali. Jakarta: available online at www.bi.go.id

Chambers, Robert, (1983). Rural Development, Putting the Last First, Longman: London.

Damuri & Day. 2015. Survey Of Recent Developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 51, No. 1. 3-27.

Dewangga, Linggar dan Achma Hendra. 2011. *Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000- 2007*. Jurnal Ekonomi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

Inna Dariwardani, Ni Made. 2014. Analisis Dinamika Kemiskinan (Poverty Dynamics) Berdasarkan Data Susenas Panel 2008 - 2010. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7 (1), : 7 - 15.

Kembar Sri Budhi, Made. 2013. Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6 (1), : 1 – 6.

Maulana, Rizky. 2020. *Apakah Pendidikan Tinggi Meningkatkan Kemungkinan untuk Bekerja di Sektor Formal?: Bukti dari Data SAKERNAS*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan. Vol. 13 No. 1 Februari 2020.

Marhaeni, A A I N, I Ketut Sudibia & Gede Andika. 2019. Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat “Membangun Desa, Membangun Indonesia”. Denpasar: CV Sastra Utama.

Meliana Sari, Resti. 2017. Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan Kota Tangerang.

Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. E-Jurnal Katalogis Vol. 3 No. 2 (2015). Hal 135-142.

Putra dan Sri Budhi. 2015. *Efektivitas Dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mpd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran Di Kecamatan*

Abiansemal Kabupaten Badung. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Hal: 183-196.

Seran, Sirilius. 2017. Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 10 No. 1 Februari 2017. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/issue/view/2412>>.

Sharp, Ansel M., Charles A. Register, and Paul W. Cirimes. 1996. *Economic Of Social Issues* (edisi ke 12). Richard D., Chicago: Irwin.

Suparlan, Dr. Parsudi (penyunting): *Kemiskinan Di Perkotaan, Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*; 1984. Jakarta. Penerbit Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia.

Suryawati, Criswardani. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Rineka Cipta. Jakarta.

Susilowati, Dwi Susilowati & Syamsul Hadi. 2017. *Pengaruh Alokasi Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur*. Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol 1 Jilid 4.

Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.

Yudistira Andi Permadi. 2018. Growth, Inequality, and Poverty : An Analysis of Pro-Poor Growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11 (2): 15-27.